

MEMBANGUN PROFESIONALISME GURU KONSELING SEKOLAH MELALUI PENYAMPAIAN BAHASA YANG SANTUN

Istina Rakhmawati

SMP Negeri 1 Undaan Kudus, Jawa Tengah, Indonesia
istinarakhmawati@gmail.com

Abstrak

Tuntutan kompetensi guru termasuk guru bimbingan dan konseling sekolah sebagai sebuah profesi mau tidak mau harus dipenuhi. Membangun profesionalisme Guru konseling akan diminta akuntabilitas layanannya oleh pengguna jasa di sekolah. Masalahnya, apakah layanan bimbingan konseling (BK) telah dilaksanakan oleh guru konseling secara profesional? Apakah keprofesionalan guru bimbingan dan konseling telah mencapai standar profesional yang ditetapkan? Masalah-masalah yang kompleks dan meluas, kurang profesionalnya guru bimbingan dan konseling akibat kompetensi guru bimbingan dan konseling yang kurang memadai, serta tuntutan perubahan yang terjadi dalam persaingan layanan profesional, memerlukan peningkatan profesionalitas guru bimbingan dan konseling khususnya terkait sikap, pengetahuan dan keterampilan guru bimbingan dan konseling. Saat ini Guru Konseling di sekolah masih kurang selektif dalam hal memberikan bimbingan yang seharusnya didapatkan siswa. Untuk konseling sekolah peran guru konseling seharusnya tidak hanya berorientasi pada bimbingan karir akan tetapi juga harus memperhatikan bimbingan belajar, bimbingan bersikap baik, bimbingan berperilaku santun, jujur, dan bimbingan hormat kepada bapak-ibu guru serta bimbingan untuk masyarakat civitas akademik (teman sebaya) di sekolah atau dalam hal ini

mentaati peraturan tata-tertib di Sekolah maupun di luar Sekolah. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengetahui potensi siswa. Salah satunya dengan mengadakan kelas percontohan maupun tes kemampuan dan bakat siswa. Melalui tes percontohan dan tes bakat, guru Bimbingan Konseling di sekolah melakukan bimbingan karier dan mengarahkan mereka pada jurusan sesuai bakatnya. Peran Guru Bimbingan Konseling di sekolah punya tugas yang banyak, kalau mereka mau mengembangkan profesinya. Tak hanya memecahkan masalah pribadi siswa, melainkan mencari masalah apa yang dihadapi siswa terutama masalah bakat dan minat. Ini penting bagi kelancaran proses belajar-mengajar di sekolah. Setelah ditemukan bakat dan minat, arahkan siswa pada jurusan yang tepat.

Kata Kunci: Profesionalisme Guru Konseling, Stelistika Bahasa

Abstract

PROFESSIONALISM OF TEACHER SCHOOL BUILDING THROUGH COUNSELING FOR SUBMISSION OF LANGUAGE POLITE. This paper aims to find out the demands of the competence of teachers, including teachers, school guidance and counseling as a profession will inevitably be met. Teachers build a professional counseling services will be requested by the service user accountability in schools. The problem, whether the counseling service (BK) has been implemented by teachers in a professional counseling? Is the guidance and counseling teacher professionalism have reached the professional standards set? The issues are complex and widespread, the lack of professional guidance and counseling teachers as a result of competence guidance and counseling teacher are inadequate, and demand changes in the competitive professional services, require an increase in the professionalism of teachers guidance and counseling particularly related attitudes, knowledge and skills guidance teachers and counseling. Currently Teachers Counseling at school is less selective in terms of providing guidance should be obtained student. The results of this paper is under the teacher's role counseling should not only oriented to the career guidance but also

should pay attention to tutoring, guidance to be good, the guidance behaves politely, honest, and guidance homage to the father-mother teacher and guidance to the public the academic community (friends peer) at school or in this case to obey the rules discipline in school and outside school. One to determine the potential of students by conducting pilot classes and tests students' abilities and talents.

Keywords: *Professionalism, Teacher Counseling, Stelistika Language*

A. Pendahuluan

Secara populer, kata profesional sering dimaknai dengan keahlian dan gaji. Suatu pekerjaan bila dilakukan secara profesional, maka pekerjaan itu terlaksana dengan optimal dan maksimal dan dibayar dengan gaji yang layak. Sebaliknya, bila pekerjaan itu dilakukan semaunya akan dibayar dengan ala kadarnya, bahkan bisa jadi tidak mendapat bayaran sama sekali, itu berarti pekerjaan tersebut bukan profesional, tetapi disebut amatiran. Kemudian apa ada kaitannya bayar dan tidak dibayar? Dalam hal ini termasuk juga profesionalisme seorang guru, bolehkah mendapat imbalan dari keahlian seorang guru? Di sini letak persoalannya, bila kata profesional dikaitkan dengan kata konseling, sehingga diperoleh istilah konseling sekolah melalui pendekatan atau penyampaian konseling dengan menggunakan bahasa yang santun serta kelembutan bahasa agar konseling tersebut benar-benar mengena pada siswa di sekolah.

Kualitas guru diukur dengan tingkat kecerdasannya (Mubarok, 2002: 170). Pada dasarnya istilah profesionalisme guru konseling sekolah bukanlah produk abad modern, akan tetapi sudah merupakan cerminan produk profesionalisme dakwah yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah saw.. Hanya saja hal seperti ini belum mendapatkan perhatian yang memadai di kalangan para tenaga pendidik, seringkali kita melihat aktivitas tersebut dilakukan secara sambilan atau jalan, tanpa mengacu pada proses perencanaan dan manajemen yang matang. Pengelolaan konseling sekolah kadang-kadang masih jarang dilakukan sehingga akibatnya optimalisasi target yang direncanakan tidak tercapai.

Konseling atau bimbingan siswa yang bersifat sambilan dapat dilakukan oleh semua orang, *amar ma'ruf nahi munkar* adalah tugas semua muslimin, menyangkut hal itu Rasulullah saw. bersabda:

"Sampaikanlah dariku walau satu ayat." Konseling dalam konteks ini sebenarnya dapat dilakukan setiap guru sekolah, guru siapa saja boleh melakukannya baik dalam posisi apapun bisa melakukannya.

Bila kita mencermati kehidupan Rasulullah saw., kita bisa melihat bahwa beliau adalah seorang guru yang profesional. Beliau adalah seorang guru yang profesional dan kompeten dalam bidang pendidikan dakwah. Beliau melakukannya secara full time, beliau meninggalkan pekerjaan sebagai pedagang dan beralih sepenuhnya pada profesi barunya sebagai guru. Walaupun beliau tidak meminta upah dari pekerjaan pengajarannya, tetapi beliau dapat hidup dari profesi ini. Sebagai gurunya umat, beliau memiliki empat potensi yang bisa di jadikan bekal dalam memikul tugasnya. Yaitu kejujuran, amanah, tablig dan kecerdasan.

Dua potensi yang pertama (kejujuran dan amanah) merupakan tuntutan etika dan dua potensi yang terakhir (keahlian komunikasi dan kecerdasan yang tinggi) merupakan tuntutan keahlian, inilah contoh sebagaimana membangun guru yang profesional melalui pendekatan konseling sekolah terkait dengan penyampaian bahasa yang lembut penuh kesantunan.

Profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Orang yang profesional adalah orang yang memiliki profesi. Seseorang disebut memiliki profesi bila ia memenuhi kriteria berikut: 1). Profesi harus mengandung keahlian, artinya suatu profesi itu harus ditandai oleh suatu keahlian yang khusus profesi itu. Keahlian itu diperoleh dengan cara mempelajarinya secara khusus karena profesi bukan diwarisi. 2). Profesi dipilih karena panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu. Profesi dipilih karena dirasakan sebagai kewajiban, sepenuh waktu maksudnya bukan *part time*. 3). Profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal, artinya profesi itu dijalani menurut aturan yang jelas, dikenal umum, dan teorinya terbuka. Secara universal pegangannya itu diakui. 4). Profesi adalah untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri. 5). Profesi harus dilengkapi dengan kecakapan dan kompetensi aplikatif. Kecakapan dan kompetensi itu diperlukan untuk meyakinkan peran profesi itu terhadap kliennya. 6). Profesi memiliki otonomi dalam melakukan tugas profesinya. Otonomi itu hanya dapat ditinjau dan dinilai oleh rekan-rekannya seprofesi. 7). Profesi memiliki kode etik

yang disebut kode etik profesi. 8). Profesi harus memiliki klien yang jelas, yaitu orang yang membutuhkan layanan (Muhibbin, 1995:230).

B. Pembahasan

Salah satu bentuk profesionalisme guru konseling adalah harus memperhatikan kode etik jabatan konselor sebagai bentuk wujud profesionalisme guru konseling. Landasan kode etika konselor adalah Dasar hukum Pancasila, mengingat bahwa profesi konselor merupakan usaha layanan terhadap sesama manusia yang bersifat ilmiah dan esensial dalam rangka tujuan ikut membina warga Negara yang efektif dan bertanggung jawab. Suatu profesi ialah pekerjaan yang dipegang oleh orang-orang yang mempunyai dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap khusus tertentu dan pekerjaan itu diakui oleh masyarakat sebagai suatu keahlian.

Konselor yang tergabung dalam Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) juga harus memiliki: (1) Sikap, ketrampilan, pengetahuan khusus tertentu dan (2) Pengakuan atas kewenangannya sebagai konselor.

1. Sikap, Keterampilan dan Pengetahuan

Konselor harus terus menerus berusaha menguasai dirinya, agar dapat memahami orang lain dengan sebaik-baiknya. Konselor harus memperlihatkan sikap sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, sadar diri, tidak boleh dogmatis, harus jujur, tertib, hormat dan percaya pada paham hidup sehat, agar seorang konselor tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam membantu klien. Konselor harus memiliki sikap tanggung jawab terhadap lembaga dan individu yang dilayani, maupun yang terhadap ikatan profesinya. Konselor harus lebih terbuka terhadap saran ataupun peringatan yang di berikan kepadanya. Konselor harus mengusahakan mutu kerja yang setinggi mungkin dalam menjalankan tugas-tugasnya. Untuk melakukan pekerjaan konselor dengan kewenangan penuh diperlukan pengetahuan dasar yang memadai tentang hakikat dan tingkah laku orang, tentang teknik dan prosedur layanan bimbingan dan pengetahuan-pengetahuan penunjang lain. Pekerjaan sebagai konselor muda atau guru (di sekolah-sekolah) memerlukan jenis pengetahuan dasar yang sama seperti yang dituntut dan seorang konselor yang berkewenangan penuh dan yang diperolehnya dari pendidikan khusus dibawah pembinaan ahli.

2. Pengakuan Kewenangan

Untuk dapat bekerja sebagai konselor atau guru pembimbing diperlukan pengakuan keahlian kewenangan oleh badan khusus yang dibentuk oleh Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia IPBI atas dasar wewenang yang diberikan kepada badan tersebut oleh pemerintah.

a. Peran Guru Konseling di Sekolah Semakin Penting

Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membangun profesionalisme guru konseling sekolah adalah "Peran guru BK dalam implemetasi kurikulum 2013 akan semakin penting, pasalnya di tingkat SMA sederajat penjurusan ditiadakan, diganti dengan kelompok peminatan," tegas guru besar bimbingan dan konseling Prof Mungin Eddy Wibowo, ketika menjadi pembicara pada seminar nasional bimbingan dan konseling di Hotel Grasia Semarang, Sabtu (4/5). Menurut Eddy, dengan diberlakukannya kelompok peminatan, maka guru BK memiliki tugas untuk memberikan pendampingan secara intensif kepada siswa. Diharapkan, siswa dapat memilih sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. "Dengan adanya program kelompok peminatan, maka peran dan tugas guru BK semakin besar. Karena sejak awal masuk, siswa harus diarahkan sesuai dengan bakat, minat, dan kecenderungan pilihannya," ujar Prof Mungin.

Ketua Umum Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) itu juga menegaskan, ke depan, peran dan tanggung jawab guru BK terhadap siswa SMP juga harus lebih nyata. Guru BK harus mulai mengamati dan mendampingi anak sejak kelas satu. Harus dilihat dan dampingi, anak tersebut senang dan minat pada mapel apa. Untuk mengarahkan studi lanjutannya, ke SMA atau SMK, kata Mungin. Perubahan dan penyempurnaan kurikulum, menurut ketua panitia seminar Sri Hartati M.Pd. Kons. adalah hal yang lumrah, akan tetapi persepsi yang berkembang di masyarakat dan isu-isu yang mengemuka membuat keresahan, kebingungan, dan bahkan kepanikan termasuk bagi guru BK. "Seminar nasional ini diusahakan tidak hanya sebatas teoritis belaka, tapi bagaimana menyusun rencana aksi yang berbasis pada peminatan siswa, kata Sri Hartatik <http://unnes.ac.id/berita/kurikulum-2013-peran-guru-bk-semakin-penting/> unduh Rabu, 13 Nov 2013 pukul 23.00 WIB).

Tidak hanya itu, seminar yang diikuti 400 peserta yang terdiri dari dosen, guru, konselor profesional, kepala dan pengawas sekolah, serta mahasiswa BK ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang posisi BK dalam kurikulum 2013, mengembangkan wawasan dan meningkatkan kompetensi konselor dalam menghadapi kurikulum 2013, mengetahui fungsi dan peran BK dalam kurikulum 2013, dan menjadikan kurikulum 2013 sebagai momentum untuk semakin mengokohkan BK sebagai sebuah profesi yang mapan. “Dengan demikian peserta dapat mengetahui bagaimana guru BK memberikan pendampingan dan arahan kepada siswa secara berkelanjutan, bagaimana guru BK mengidentifikasi apa yang diminati dan masalah yang dihadapi siswa, serta bagaimana metode monitoring dan konseling yang seharusnya dilakukan sesuai kurikulum baru ini,” katanya. (Seminar Nasional Guru BK di FIP UNNES 2013) Reposisi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 di FIP UNNES, http://unes.ac.id/berita/kurikulum-2013-peran-guru-bk-semakin-penting/unduh_rabu,13_Nov_2013_pukul_23.00_WIB).

b. Arah Profesionalisme Guru Konseling Sekolah

Pada arah tuntutan kompetensi guru termasuk konseling sekolah sebagai sebuah profesi mau tidak mau harus kita perhatikan. Misalnya guru konseling akan diminta akuntabilitas layanannya oleh pengguna jasa. Masalahnya, apakah layanan konseling telah dilaksanakan oleh guru konseling secara profesional atau belum? Apakah keprofesionalan guru konseling telah mencapai standar profesional yang ditetapkan atau juga belum? Masalah-masalah yang kompleks dan meluas, kurang profesionalnya guru bimbingan dan konseling akibat kompetensi guru bimbingan dan konseling yang kurang memadai, Untuk kegiatan profesionalisme Bimbingan Konseling di sekolah ini meliputi: 1) penyimpanan dan penggunaan informasi, 2) *testing*, 3) *tiset*, 4) layanan individual, hubungan dengan klien, 5) konsultasi dan hubungan dengan rekan atau ahli lain.

Membahas profesionalisme guru konseling itu bukan hanya mencakup sisi nasihat kepada putra-putri siswa kita, akan tetapi juga harus pelakunya yang dalam hal ini adalah gurunya sendiri. Secara populer, kata profesionalisme dimaknai dengan ahli atau gaji. Suatu pekerjaan bila dilakukan secara profesional maka pekerjaan itu dapat terlaksana dengan optimal dan maksimal. Melihat dari kelima teori

tersebut diatas maka untuk dapat melakukan tugas guru konseling secara profesional maka juga perlu adanya pendekatan konseling disampaikan melalui pendekatan gaya bahasa yang halus, ramah, sopan agar siswa ketika sedang bersinggungan dengan masalah, seakan-akan tidak terhakimi sebagaimana siswa yang terkena masalah.

Berbagai masalah sekarang ini menuntut pihak sekolah untuk meningkatkan professional guru konseling, sehingga mampu memecahkan setiap problem yang dialami siswa baik pribadi maupun sosial, baik di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah. Kompleksitas problem di era sekarang memang sulit dikendalikan. Ia melaju dengan kecepatan mahadasyat dan selalu menimbulkan masalah baik psikologi, moral, mental maupun *mind set* siswa.

Lambat dalam pengantisipasi dinamika akseleratif ini membuat sekolah semakin ketinggalan zaman. Di sinilah urgensi optimalisasi fungsi profesionalisme guru dalam konseling sekolah sangat dibutuhkan. Menuju sekolah yang berkualitas dengan proses dan *output* yang berkualitas membutuhkan sentuhan tangan dingin yang secara profesional oleh guru khususnya melalui berbagai pendekatan, baik pencegahan problem yang tidak kita inginkan, pemahaman yang berfungsi sebagai bimbingan konseling melalui pendekatan bahasa yang baik dan bijaksana, artinya dengan bahasa yang baik kita terhindar dari miss komunikasi dan masih banyak lagi.

c. Relasi Hak dan Kewajiban Guru Sebagai Konseling

Tantangan yang harus segera diluruskan adalah seharusnya guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah adalah konselor yang mendidik, bukan dianggap sebagai "*polisi sekolah*" atau momok yang ditakuti oleh siswa. Pengurus Daerah Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) Provinsi Jawa Tengah Kusnarto Kurniawan menambahkan, tantangan yang harus segera diluruskan adalah seharusnya guru BK di sekolah adalah konselor yang mendidik. Bukan dianggap sebagai "pemadam kebakaran" atau momok yang ditakuti oleh siswa. "ABKIN akan selalu mengontrol agar BK semakin bisa diterima di sekolah."

ABKIN, menurutnya, juga mengawal dan mengamankan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 27 tahun 2008. "Misalnya dalam penerimaan guru BK baru harusnya berkualifikasi S1 BK dan pendidikan konselor," katanya. Dia juga menambahkan, ABKIN juga aktif dalam pengawalan kompetensi

terhadap guru BK di lapangan, meningkatkan kompetensi profesional mulai dari assesment, penyusunan program, pemberian layanan. Selain itu juga ada kegiatan pendukung seperti penilaian layanan serta penelitian tindakan BK melalui seminar dan lokakarya juga pendidikan dan latihan bekerja sama dengan dinas pendidikan provinsi.

ABKIN mengomunikasikan tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor kepada Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah dan BKD Jawa Tengah. Dengan pengawalan dan pengamanan implementasi permendiknas nomor 27 tahun 2008 dan kegiatan nyata untuk peningkatan kompetensi profesional tersebut, termasuk upaya nyata pelurusan BK yang masih dianggap polisi sekolah," imbuhnya. (<http://unnes.ac.id/berita/tantangan-menjadi-guru-bk-semakin-berat/>)

Di antara beberapa macam hak dan kewajiban seorang guru konseling di sekolah meliputi: 1) Jikalau konselor bertindak sebagai konsultan pada suatu lembaga, maka harus ada pengertian dan kesepakatan yang jelas antara konsultan dengan pihak lembaga dan dengan klien yang menghubungi konselor di tempat lembaga itu. Sebagai seorang konsultan, konselor harus tetap mengikuti dasar-dasar pokok profesinya dan tidak bekerja atas dasar komersial. 2) Prinsip-prinsip yang berlaku dalam layanan individual, khususnya tentang penyimpanan serta penyebaran informasi tentang klien dan hubungan konfidensial antara konselor dengan klien berlaku juga bila konselor bekerja dalam hubungan kelembagaan. 3) Setiap konselor yang bekerja dalam kelembagaan turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan kerjasama dengan pihak atasan atau bawahannya, terutama dalam rangka layanan konseling dengan menjaga rahasia pribadi yang dipercayakan kepadanya. 4) Peraturan-peraturan kelembagaan yang diikuti oleh semua petugas dalam lembaga harus dianggap mencerminkan kebijaksanaan lembaga itu dan bukan pertimbangan pribadi. 5) Konselor tidak dibenarkan menyalahgunakan jabatannya untuk maksud mencari keuntungan pribadi atau maksud-maksud lain yang dapat merugikan klien. 6) Konselor harus mengkaji tingkah laku dan perbuatannya.

d. Kode Etik Konseling Sebagai Pijakan Kearah Mutu Layanan Konseling

Ikatan petugas bimbingan Indonesia merupakan organisasi ilmiah dan profesional para anggota pendidik yang bertugas di bidang bimbingan konseling dan bidang-bidang layanan bantuan pada umumnya. Dorongan utama memasuki ikatan ini adalah kesadaran bahwa mereka sama-sama berada dalam satu profesi bimbingan (Pihasnawati, 2008:200).

Adanya aturan dan patokan perilaku anggota itu dimaksudkan agar dapat menjadi sarana pengendalian mutu pelayanan yang ingin ditegakkan ikatan. Menjadikan tata karma sebagai patokan yang dijadikan alat belajar bagi pengembangan diri anggota menuju kearah peningkatan mutu layanan yang lebih tinggi. Secara umum: (a) Mengingat adanya keragaman keanggotaan dalam ikatan status dirinya, latar belakang tempat dan pengalaman kerja, dan kemampuannya agar ia bisa mengidentifikasi tingkat dan jenis layanan apa yang bisa diberikan, siapa kelompok sasaran layanan. (b) Adanya kesadaran anggota bahwa ia berkewajiban ikut memajukan profesi. (c) Anggota sebagai pribadi selalu menilai perilaku dan sikapnya, apakah selaras dengan tuntutan kepribadian seorang tenaga profesional layanan bimbingan. (d) Anggota mengusahakan pola perilaku dan sikap pergaulan yang selaras dengan norma-norma.

Adapun anggota ikatan yang menjalankan tugas bantuan khusus berupa layanan konseling harus selalu berusaha mematuhi ketentuan kode etik yang berlaku bagi konselor seperti yang ditetapkan oleh Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Dasar Kode Etik Profesi Konseling di Indonesia, *pertama*, adalah Pancasila, mengingat bahwa profesi konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga Negara yang bertanggung jawab. *Kedua*, adalah tuntutan profesi, mengacu kepada kebutuhan dan kebahagiaan klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Kualifikasi konselor harus memiliki: wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor. Proses layanan: hubungan dalam pemberian layanan, *pertama*, kewajiban konselor untuk menangani klien berlangsung selama ada kesempatan dalam hubungan antar klien dengan konselor. *Kedua*, klien sepenuhnya berhak untuk mengakhiri

hubungan dengan konselor, meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang konkret. *Ketiga*, hubungan dengan klien, konselor harus menghargai harkat pribadi, integritas dan keyakinan klien. Konselor harus menempatkan kepentingan kliennya di atas kepentingan pribadinya. Konselor tidak mengadakan pembedaan klien atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama atau status sosial ekonomi, konselor tidak akan memaksa untuk memberikan bantuan kepada seseorang. Dan tidak akan mencampuri urusan pribadi orang lain tanpa izin dari orang yang bersangkutan.

Skema pengelolaan kasus dengan pendekatan-pendekatan konseling, antara lain: (a) Pembukaan: membangun rapport (b) Penjelasan masalah: di ambil dari rambu-rambu kasus apa yang kiranya di utarakan oleh konseli? (c) Analisis masalah: digali latar belakang masalah menurut sistematika tertentu (tidak ada yang baku).

Hal-hal ini tidak harus digali dengan menggunakan istilah seperti digunakan dalam butir a, b, c dapat digali secara tersirat dengan bertanya tentang lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, cita-cita masa depan, lamanya sudah ada persoalan dan lain sebagainya yang oleh konselor dianggap relevan. Pada umumnya sudah jelas apa isi alternatif yang tersedia (yang salah satunya harus dipilih) dan jumlah alternatif. Namun seandainya hal ini belum jelas harus diperjelas dahulu (*investarisasi alternatif*).

Dalam penyelesaian masalah ini konselor dapat menggunakan pendekatan-pendekatan bimbingan konseling yang sesuai dengan masalah yang sedang di alami oleh klien. Sehingga dapat tercapainya hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang di harapkan.

e. Evaluasi Bimbingan Konseling Sekolah

Salah satu komponen membangun profesionalisme guru bimbingan dan konseling di sekolah adalah melakukan evaluasi program, yaitu usaha menilai efisiensi dan efektivitas dari layanan bimbingan itu sendiri, khususnya seluruh kegiatan dalam rangka program bimbingan yang dikelola oleh staf bimbingan. Program bimbingan direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, untuk mengetahui sampai seberapa jauh segala tujuan itu tercapai, dibutuhkan usaha tersendiri mengumpulkan data yang dapat memberikan indikasi tentang hal itu dan menafsirkan data yang telah terkumpul.

Pengadaan evaluasi terhadap program bimbingan merupakan salah satu cara staf bimbingan mempertanggungjawabkan kegiatan profesinya kepada pihak yang mengikat mereka sebagai tenaga bimbingan di sekolah. Disamping itu, suatu program bimbingan harus terbuka bagi beraneka perubahan yang dapat memperluas lingkup pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan.

f. Keharusan untuk Mengadakan Evaluasi Konseling di Sekolah

Membuat evaluasi berarti membentuk pendapat mengenai efisiensi dan efektifitas dari segala usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan standar atau kriteria tertentu sebagai patokan. Untuk dapat mengetahui efektifitas seluruh kegiatan bimbingan, mutlak perlu diadakan evaluasi secara objektif dengan mengumpulkan data yang dapat diandalkan dan menerapkan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi dapat bersifat formal dan informal. Evaluasi formal mencakup suatu penelitian sistematis dan ilmiah, berdasarkan suatu desain dan dengan menggunakan metode serta alat tertentu. Sedangkan evaluasi informal merupakan suatu proses penilaian terhadap efektifitas pelayanan bimbingan tanpa berpegang pada suatu desain ilmiah dan tanpa menggunakan metode serta alat yang ditetapkan dalam desain.

Evaluasi atau penilaian diadakan melalui peninjauan terhadap hasil yang diperoleh setelah siswa atau orang muda lain berpartisipasi penuh dalam kegiatan bimbingan dan melalui peninjauan terhadap rangkaian kegiatan itu sendiri dalam berbagai aspeknya. Peninjauan evaluatif yang pertama memusatkan perhatian pada efek-efek yang dihasilkan, sesuai dengan aneka tujuan bimbingan, dan dikenal dengan nama Evaluasi Produk atau Evaluasi Rendemen. Peninjauan evaluatif yang kedua memusatkan perhatian pada berbagai aspek dari kegiatan bimbingan yang mendahului tercapainya efek, termasuk tujuan-tujuan bimbingan, dan dikenal dengan nama Evaluasi Proses, evaluasi ini bersifat komplementer, yaitu saling melengkapi.

g. Kriteria yang Diterapkan

Penetapan kriteria relevan sebagai patokan dalam evaluasi program sudah lama merupakan persoalan yang belum terpecahkan secara tuntas. Menurut pandangan Shertzer dan Stone menyebutkan

bahwa sejumlah ciri-ciri yang melekat pada program bimbingan yang baik meliputi ciri eksternal dan ciri internal.

Ciri-ciri eksternal adalah: 1) Terdapat seorang tenaga ahli bimbingan untuk setiap 250-300 siswa, dengan alasan bahwa rasio ini pada umumnya memungkinkan konselor sekolah untuk melayani populasi siswa secara memadai. 2) Pelayanan bimbingan menjangkau seluruh populasi siswa dan tidak terbatas pada kelompok siswa tertentu atau tingkatan kelas tertentu.

Adapun ciri-ciri internal adalah: 1) Program bimbingan bersumber pada kebutuhan-kebutuhan siswa yang nyata dan realistis, dengan mengikat tugas-tugas perkembangan untuk rentan umur tertentu dan keadaan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat pada saat sekarang. 2) Sifat-sifat bimbingan yang menonjol ialah sifat preventif dan developmental, sehingga lebih banyak dicurahkan perhatian pada usaha bimbingan pencegahan dan pendampingan daripada usaha bimbingan korektif.

h. Metode dan Alat-alat Pengorganisasian Guru Konseling

Dalam rangka evaluasi formal terhadap program bimbingan digunakan metode-metode dan alat-alat tertentu untuk mengumpulkan data yang dikumpulkan, menyusun dan mengorganisasi data itu, serta menafsirkannya. Ada 4 metode yang diterapkan yang masing-masing menggunakan alat atau instrument yang sesuai yaitu:

1) Metode Survei

Metode survei dapat diterapkan untuk mendapatkan data tentang lingkungan yang di dalamnya program bimbingan harus beroperasi, tentang pengelolaan program bimbingan tentang sikap dan pandangan staf pendidikan di sekolah yang bukan tenaga bimbingan terhadap program bimbingan, dan tentang sikap dan pandangan alumni terhadap pelayanan bimbingan yang mereka terima ketika masih terdaftar sebagai siswa di institusi pendidikan yang bersangkutan. Alat yang digunakan ialah daftar item yang harus dijawab oleh responden dengan ya, tidak, atau angka-angka, atau dijawab dengan kurang, cukup, atau baik, atau ditanggapi oleh orang yang mengadakan penelitian dengan ada atau tidak ada atau dengan baik, cukup, atau kurang. Daftar item ini dapat berupa angket tertutup.

2) Metode Observasi

Evaluasi informal untuk sebagian besar dilakukan berdasarkan observasi, tetapi observasi ini tidak diadakan dengan berpedoman pada suatu rencana atau desain penelitian ilmiah, dan oleh karena itu, menghasilkan data yang kurang terandalkan. Unsur subjektivitas dalam mengadakan observasi dapat dikurangi dengan melibatkan lebih dari satu orang, yang kemudian membandingkan hasil observasinya. Dengan demikian, kegiatan observasi yang biasanya berlangsung dengan agak spontan dapat diangkat dari taraf evaluasi informal dan ditingkatkan menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi evaluasi formal.

3) Metode Studi Kasus

Dalam rangka studi kasus dikumpulkan lebih dahulu data yang relevan untuk menemukan dalam aspek-aspek apa saja tertentu seharusnya berubah, kemudian ditentukan apa bentuk dan isi perubahan yang perlu diusahakan serta diatur bentuk dan isi pelayanan bimbingan yang akan diberikan. Sesudah program layanan bimbingan yang dirancang khusus untuk individu ini mulai berjalan, dikumpulkan data mengenai kemajuan yang dicapai dan sampai seberapa jauh perubahan yang ditargetkan tercapai. Metode studi kasus memuatkan perhatian pada perkembangan siswa tertentu, karena itu metode ini mempunyai kelebihan dibanding dengan metode evaluasi lain, yang lebih memperhatikan perubahan yang terjadi dalam kelompok siswa.

4) Metode Eksperimental

Penggunaan metode eksperimental bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih kelompok dalam satu atau beberapa variabel menuntut rangkaian langkah kerja dalam urutan tertentu, yaitu penetapan tujuan yang akan dicapai dan menentukan saluran untuk mencapai tujuan itu, penentuan saluran yang akan digunakan untuk mengetahui apakah tujuan tercapai, pemilihan kelompok eksperimental yang akan diperlakukan secara khusus dan kelompok kontrol, pelaksanaan proses mengimplementasikan cara atau saluran yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan pengumpulan data mengenai produk yang akan dihasilkan oleh kelompok eksperimental. Metode eksperimental

ini bersifat komplementer. Itulah beberapa contoh metode yang ditawarkan oleh seorang guru konseling secara profesional.

i. Perubahan dalam Program BK

Merencanakan dan mengimplementasikan perubahan atau perbaikan demi pengembangan dan peningkatan mutu program bimbingan di sekolah bukanlah hal yang serba mudah karena perubahan atau perbaikan itu tidak hanya menyangkut penggunaan beberapa teknik yang dianggap lebih modern. Perencanaan dan pengelolaan suatu program bimbingan bersifat cukup kompleks karena banyaknya aspek yang harus ditinjau. Di samping itu, laju perubahan dalam bentuk dan isi seluruh kegiatan bimbingan di institusi pendidikan cenderung mengikuti laju perkembangan dalam dunia pendidikan, yang pada umumnya lambat dan memakan waktu lama.

Mengingat kenyataan ini, pengadaan perubahan mendasar dalam program bimbingan tidak terselesaikan dalam sekali berapat dinas dan kemudian mulai dilaksanakan. Dalam bukunya *Fundamentals of Guidance*, Shertzer dan Stone menunjukkan suatu rangkaian langkah kerja sebagai berikut: 1) Memperoleh kesepakatan diantara seluruh anggota staf bimbingan bahwa akan diusahakan perubahan dalam program bimbingan kalau hasil evaluasi formal menunjukkan beberapa kelemahan tertentu. 2) Menentukan dalam hal-hal apa yang dibutuhkan untuk perubahan yang paling mendesak sesuai hasil evaluasi. 3) Menganalisis keseluruhan situasi dan kondisi sekolah untuk mengetahui dimana letak faktor penyebab hambatan yang utama. 4) Menjelaskan keadaan sekarang kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan perubahan terhadap program bimbingan dan menggambarkan keadaan yang lebih ideal yang dicita-citakan.

j. Evaluasi terhadap Konselor Sekolah

Sebagaimana pada waktu-waktu tertentu diadakan evaluasi terhadap tenaga pengajar, misalnya berkaitan dengan kenaikan pangkat atau akademik, demikian pula wajarlah kalau tenaga pendidik non-guru juga dievaluasi seperti pejabat struktural dan konselor sekolah. Oleh karena itu dalam evaluasi terhadap konselor sekolah meliputi beberapa kriteria, yaitu: 1) Kriteria yang diterapkan harus dijabarkan dari fungsi, tugas dan wewenang seorang konselor dalam suatu institusi pendidikan formal. 2) Dalam hal metode serta alat yang dapat digunakan muncul suatu kesukaran karena jumlah kegiatan yang dilakukan oleh konselor

sekolah cenderung lebih banyak, dan variasi sekali. Dalam hal ini salah satu contoh yaitu diadakan observasi langsung terhadap guru yang mengajar dikelas dengan berpegang pada suatu daftar observasi. 3) Dari uraian butir satu dan dua kiranya sudah jelas bahwa bukan sembarang pejabat struktural berkemampuan dan berwenang sepenuhnya untuk mengadakan evaluasi terhadap konselor sekolah serta prestasi kerjanya.

k. Perlunya Guru Konseling Sekolah Melalui Pendekatan Bahasa Santun

Bahwa perlunya guru konseling sekolah melalui pendekatan gaya bahasa yang santun atau retorika stelistika bahasa sangatlah dibutuhkan. Perlunya membangun stelitika bahasa dalam pelayanan bimbingan konseling kepada siswa-siswa disekolah secara professional sampai saat ini sangat difokuskan pada generasi muda khususnya yang masih duduk di bangkai sekolah dan bangkai kuliah. Kalau bimbingan konseli diartikan sebagai proses membantu orang perorang dalam memahami dirinya sendiri dan lingkungan hidupnya, itu berarti bahwa tenaga guru konseling profesional di lembaga sekolah melibatkan diri dalam segala usaha membantu siswa untuk memahami dirinya sendiri dan lingkungannya dewasa ini. Untuk itu perlu tenaga atau petugas seorang guru profesional dalam menangani khusus dibidang konseling sekolah agar setiap civitas akademik sekolah dapat berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa yakni ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

Guru disamping sebagai seorang pendidik sekaligus juga sebagai seorang konseling sekolah mau tidak mau harus dituntut untuk professional dalam menjalankan tugasnya. Artinya secara formal seorang guru disiapkan oleh lembaga atau institusi pendidikan yang berwenang. Mereka didik secara khusus untuk menguasai seperangkat kompetensi yang diperlukan bagi pekerjaan bimbingan dan konseling sekolah. Jadi dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa guru konseling atau seorang guru konselor sekolah memang sengaja dibentuk atau disiapkan untuk menjadi tenaga-tenaga yang professional sekaligus santun di dalam menjalankan tugasnya. santun disini bisa kita maknai santun dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang disertai dengan pengetahuan, pengalaman, dan kualitas pribadinya, cakap dan tegas

dalam setiap mengambil keputusan serta menyelesaikan masalah yang terjadi kapan saja maupun dimana saja.

Adapun kesantunan dalam tugas-tugas mereka sebagai seorang konselor sekolah yang professional dirumuskan sebagai berikut: *pertama*, bertanggung jawab tentang keseluruhan pelaksanaan layanan konseling sekolah. *Kedua*, mengumpulkan, menyusun, mengolah serta menafsirkan data, yang kemudian dapat dipergunakan oleh semua staf bimbingan konseling disekolah. *Ketiga*, memilih dan mempergunakan instrument tes psikologis untuk memperoleh berbagai informasi mengenai bakat-bakat khusus, minat, kepribadian kelompok dan intelegensinya untuk masing-masing siswa. *Keempat*, membantu petugas bimbingan untuk mengumpulkan, menyusun dan mempergunakan informasi tentang berbagai permasalahan pendidikan, pekerjaan, jabatan, karir yang dibutuhkan oleh guru khususnya perbidang studi yang dalam hal ini tanpa terkecuali adalah guru bahasa Indonesia dan sebagainya. *Kelima*, melayani orang tua atau wali murid yang ingin mengadakan konsultasi tentang anak-anaknya (Masturin, 2008:71).

C. Simpulan

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa guru disamping sebagai seorang pendidik sekaligus juga sebagai seorang konseling sekolah mau tidak mau harus dituntut untuk professional dalam menjalankan tugasnya. Maka dalam hal ini dibutuhkan guru konseling sekolah melalui pendekatan gaya bahasa yang santun atau retorika stelistika bahasa sangatlah dibutuhkan. Perlunya membangun stelistika bahasa dalam pelayanan bimbingan konseling kepada siswa-siswa disekolah secara professional sampai saat ini sangat difokuskan.

Untuk konseling sekolah peran guru konseling seharusnya tidak hanya berorientasi pada bimbingan karir akan tetapi juga harus memperhatikan bimbingan belajar, bimbingan bersikap baik, bimbingan berperilaku santun, jujur, dan bimbingan hormat kepada bapak-ibu guru serta bimbingan untuk masyarakat civitas akademik. Salah satu bentuk profesionalisme guru konseling adalah harus memperhatikan kode etik jabatan konselor sebagai bentuk wujud profesionalisme guru konseling. Tantangan yang harus segera diluruskan adalah seharusnya guru konseling di sekolah adalah konselor yang mendidik. Bukan dianggap sebagai “pemadam kebakaran” atau momok yang ditakuti oleh

siswa. Untuk itu perlu tenaga atau petugas seorang guru profesional dalam menangani khusus dibidang konseling sekolah agar setiap civitas akademik sekolah dapat berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa yakni ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmani, Jamal Ma'mur, 2010, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Yogyakarta: PT. Diva Press.
- D. K, Sukardi, 2000, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: Renika Cipta.
- Gunawan, Ary, 2000, *Sosiologi Pendidikan suatu Problematika Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayah, Rifa, dkk., 2009, *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Masturin dan Zaenal Khafidin, 2008, *BKI Pendidikan*, Buku Daras, STAIN Kudus.
- Suryosubroto, 1997, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syah, Muhibbin 1995, *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Press.
- Utsman, Kahar 2009, *Sosiologi Pendidikan*, Buku Daras, STAIN Kudus.

Halaman Ini Bukan Sengaja Untuk Dikosongkan